

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah pergolakan muncul di negara Spanyol pada awal abad ke-20. Pergolakan tersebut tepatnya terjadi pada tahun 1930an dimana munculnya sebuah gerakan dari kelompok masyarakat di Spanyol. Kelompok masyarakat tersebut ingin mengubah bentuk negara Spanyol dari bentuk monarki menjadi sebuah negara republik. Kelompok tersebut bergerak dengan membubarkan pemerintahan sebelumnya yang bersifat monarki. Gerakan dari kelompok masyarakat tersebut kemudian menjadi pemicu dan menghasilkan suatu perpecahan di Spanyol yang kemudian dikenal dengan nama *Civil War* atau perang saudara di negara tersebut. Tokoh penting di dalam perang tersebut bernama Fransisco Franco, seorang tentara Spanyol yang saat perang saudara tersebut berlangsung menjabat sebagai pemimpin dari Kelompok Nasionalis¹.

Perang saudara di Spanyol dimulai dengan perlawanan Kelompok Nasionalis yang didukung oleh Militer terhadap pemberontakan Kelompok Republik² di seluruh

¹ Kelompok Nasionalis yang dimaksud disini adalah gerakan dari kelompok masyarakat di Spanyol pada saat itu yang menentang gerakan dari kelompok masyarakat oposisi yang ingin merubah bentuk pemerintahan Spanyol menjadi pemerintahan republik. Kelompok masyarakat ini dipimpin oleh Fransisco Franco. Kelompok Nasionalis memiliki basis dukungan di masyarakat pedesaan, masyarakat golongan atas, masyarakat Spanyol konservatif dan juga Kelompok Gereja Katolik. Kelompok Nasionalis umumnya memiliki basis dukungan di pedesaan, masyarakat yang kaya dan konservatif. Pada umumnya mereka adalah kelompok Katolik Roma, dan kelompok masyarakat yang mendukung sentralisasi kekuasaan. Kelompok ini juga didukung oleh negara-negara Fasis, seperti Italia dan Jerman. Paul Preston, *The Spanish Civil War 1936 – 1939*, Chicago : Grove Press, Inc, 1986, hlm 51

² Kelompok Republik merupakan kelompok masyarakat di Spanyol yang ingin mengubah bentuk negara Spanyol menjadi sebuah negara republik dengan membubarkan pemerintahan sebelumnya yang bersifat Monarki. Kelompok Republik terdiri atas masyarakat yang mendukung demokrasi liberal kapitalis hingga komunis dan juga kaum revolusioner anarkis. Basis kekuatan mereka terutama adalah sekular dan urban (termasuk kaum buruh tani yang tidak memiliki tanah) dan khususnya di wilayah-wilayah industri di Spanyol seperti daerah Asturias dan Catalunya. Daerah Basque yang konservatif juga memihak dengan Republik, terutama karena ia, bersama-sama dengan tetangganya Catalunya, berusaha mendapatkan otonomi dari pemerintahan pusat yang belakangan ditindas dengan menciptakan sentralisasi terhadap kaum nasionalis. Kelompok Republik mendapatkan bantuan senjata dan relawan perang dari Uni Soviet dan gerakan Komunis internasional. Paul Preston, *Ibid*, hlm 51

wilayah Spanyol, yang kemudian dilanjutkan dengan pembalasan dari Kelompok Republik terhadap para kelompok agama Gereja Katolik, yang dipandang oleh Kaum Republik bahwa gereja sebagai lembaga yang ikut menindas rakyat dan mendukung pemerintahan. Dalam konflik tersebut, Kaum Nasionalis juga melakukan program pembunuhan massal terhadap orang – orang yang dianggap sebagai musuh mereka³. Kaum Nasionalis juga melakukan pemeriksaan dari rumah ke rumah, dan orang-orang yang tidak disukai seringkali dipenjarakan atau dibunuh. Para aktivis serikat buruh, yang dikenal sebagai simpatisan Kelompok Republik sering dijadikan oleh Franco dan Kelompok Nasionalisnya sebagai orang-orang pertama yang diincar karena dianggap menentang Kelompok Nasionalis. Kaum Nasionalis juga melakukan serangan secara sporadis dengan melakukan pengeboman dari udara terhadap wilayah-wilayah sipil dengan bantuan angkatan udara Jerman dan Italia.

Pada tanggal 17 Juli 1936, Perang Saudara di Spanyol dimulai dan Franco menggabungkan perwira tinggi dalam pasukan tentara Spanyol yang lain ke dalam sebuah pertemuan tentang usaha menggulingkan pembontakan dan Franco sepenuhnya melibatkan diri turut serta dalam melawan pemberontakan Kelompok Republik.⁴ Beberapa lawan politiknya dibuang ke dalam pengasingan dan tidak ada satu orangpun yang bisa melawannya. Franco mencoba mengikuti taktik Adolf Hitler di Nazi Jerman dengan menyatakan dirinya sebagai pemimpin yang sangat berkuasa, dengan memajang sebuah poster raksasa Franco di ibu kota Spanyol, Madrid yang diperlihatkannya kepada masyarakat Spanyol dengan menuliskan semboyan kepemimpinannya yaitu

*"Satu Negara Bagian!" Satu Negara! Satu orang Kepala! Franco! Franco!
Franco! Di seluruh Spanyol.*⁵

Pada usahanya menguasai Spanyol, Franco dan Tentara Nasionalisnya ditambah dengan bantuan tentara Jerman dan Italia juga berusaha untuk menduduki daerah

³ Sheelagh Elwood, *Franco; Profiles In Power*, London : Longman. 1994, hlm 62

⁴ Paul Preston , *Op.Cit*, hlm 52

⁵ Sheelagh Elwood, *Op.Cit*, hlm 80

Badajoz. Pada Juli 1937, Kaum Nasionalis berhasil menduduki daerah Bilbao yang akhirnya daerah tersebut dijadikan Franco sebagai fasilitas pangkalan perang para pasukannya.

Faktor yang mendukung keberhasilan Francisco Franco menjadi penguasa di Spanyol adalah adanya dukungan dari para anggota kelompok agama Katolik di Spanyol. Franco dengan senantiasa membela kepentingan kelompok Gereja Katolik untuk tujuan-tujuannya menambah kekuatannya. Semua gerakan - gerakan agama yang muncul dan berada di luar dari prinsip-prinsip fasis diancam oleh kelompok Franco apabila menentang kebijakan dari pemerintahan. Agama Katolik merupakan agama yang kuat di Negara Spanyol dan kebanyakan pendeta merupakan pendukung fasisme yang sangat jelas, sehingga konsep fasisme Spanyol perlu disosialisasikan dan dipublikasikan di masyarakat Spanyol⁶. Penyebaran konsep fasis Franco tersebut dibantu seorang bernama José María Gil-Robles y Quiñones atau biasa dikenal dengan Gil Robles⁷ Gil Robles memanfaatkan berbagai lembaga dan badan kerjasama Katolik, serta kelompok-kelompok pemuda Katolik untuk penyebaran konsep fasisme. Media-media Katolik pun memberi dukungan kepada fasisme. Robles juga menjalankan surat kabar *El Debate*, yang terkenal di kalangan konservatif.

Setelah konsep tersebut sudah disosialisasikan, Gereja juga mendukung kaum fasis Spanyol sehingga menambah kekuatan Franco didalam kepemimpinannya. Orang-orang Spanyol di Amerika Latin dan kelompok-kelompok fasis lainnya membentuk Falange versi mereka sendiri, sehingga negara-negara ini bisa digiring ke bawah kekuasaan rezim Franco di Spanyol. Ketika konsep fasisme tersebut dibawa ke

⁶ Paul Preston, *The Triumph of Democracy in Spain*, London : Routledge, 1990, hlm 331

⁷ José María Gil-Robles y Quiñones adalah seorang sekretaris Konfederasi dan anggota nasional agraris Katolik Dewan Tulisan *El Debate*. Robles mempunyai hubungan dekat dengan para pemilik tanah terkuat di Spanyol. Ketika fasisme sedang mengalami masa jayanya di negara Jerman, Robles berangkat menuju ke sana dengan tujuan untuk mempelajari metode-metode yang dilakukan Jerman. Robles berusaha meniru fasisme Jerman dalam banyak aspek, namun ia tidak dapat mengajukan teori *superior* dan *ras Aria*. Ia menciptakan sebuah chauvinisme ekstrem, yang dihubungkan dengan ajaran Katolik yang kurang lebih pemikirannya adalah "*Spanyol adalah segala-galanya. Tuhan mendukung Spanyol. Kalian adalah Katolik sebagaimana kalian merasa sebagai bangsa Spanyol!*".

Spanyol, dengan bantuan partai Falange dan kekuatan militernya, Franco mengukuhkan jati dirinya sebagai seorang pemimpin militer kejam dan diktator. Selama perang berlangsung diperkirakan sekitar 500.000 warga sipil tewas selama konflik berlangsung dan juga banyak bangunan di Spanyol yang hancur. Diperkirakan juga ada sekitar 200.000 tawanan politik yang diperkirakan meninggal akibat kelaparan dan perbudakan dalam bekerja.⁸

Perang Saudara di Spanyol berakhir pada tanggal 1 April 1939. Perang saudara ini menghasilkan kemenangan untuk kelompok nasionalis yang didukung oleh kekuatan bersenjata militer dengan ideologi fasis. Franco dengan cepat bertindak untuk waspada terhadap semua yang bisa menjadi ancaman kepada rezimnya yang baru. Dalam pidato awalnya, Franco menyatakan bahwa,

"Perang saudara telah selesai tetapi musuh tidak akan pernah mati".

Franco sadar bahwa telah cukup banyak tekanan dari masyarakat kepada pemerintahan untuk kembali memulihkan kondisi negara. Franco secara efektif memanfaatkan kelompok falange yang bersifat fasis sebagai doktrin untuk melakukan revolusi nasional yang dipimpinnya maupun para anggotanya yang bersifat militan. Dengan faktor kemenangan kelompok Nasionalis di dalam perang saudara, Franco akhirnya memimpin negara Spanyol dan melakukan penataan secara totaliter dengan mengerahkan semua lembaga nasional yang menjamin totalitas, kesatuan, dan kelestariannya.

Sesudah perang terjadi, Franco sadar bahwa terdapat cukup banyak tekanan kembali memulihkan kondisi Negara Spanyol. Rezim baru menghadapi hutang sangat besar. Diperkirakan pemerintahan Spanyol berhutang 400 juta Reichsmarks ke Jerman dan 5 milyar Lira ke Italia. Setelah mendapatkan bantuan pinjaman dan investasi secara besar – besaran dari Amerika Serikat dan diterapkannya program liberalisasi ekonomi yang baru di rezim Franco, Spanyol mulai bergerak ke arah pembangunan ekonomi dan perubahan politik. Pada usia ke-83, Franco meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 20 November 1975. Meskipun

⁸ Michael Mann, *Fascist*, Canberra : Cambridge University Press. 2004, hlm 334

Franco telah menjadi pemimpin yang diktator, namun kematiannya tetap ditangani oleh banyak masyarakat di Spanyol. Lebih dari 400.00 orang tetap berbaris untuk memberikan penghormatan terakhir di depan jenazahnya⁹.

1.2 Perumusan Masalah

Di Spanyol, Franco menjadi penguasa di Spanyol setelah kemenangan Kelompok Nasionalis yang dipimpinnya berhasil mengalahkan Kelompok Republik di dalam perang saudara. Keberadaan Franco di dalam konflik di Spanyol sebagai upaya rezim untuk membangun situasi yang kondusif di Spanyol dengan mencakup penguasaan wilayah, pengaruh dan kekuasaan di dalam masyarakat Spanyol. Pada masa kepemimpinannya, Franco membuat kebijakan dengan mengisolasi Spanyol dari seluruh dinamika politik dunia. Franco berkuasa atas negara yang baru akan melakukan pengembangan dalam bidang industri dan baru bangkit sehabis perang, sehingga ketika Perang Dunia II terjadi, Franco membuat kebijakan dengan tidak melibatkan negara Spanyol dalam persekutuan fasisme membantu Italia-Jerman dalam Perang Dunia II. Kebijakannya antara lain dengan membuat Spanyol berstatus netral dalam Perang Dunia II, Spanyol netral dalam blok militer dalam perang dingin dan Spanyol tidak terlibat dalam konsolidasi Uni-Eropa.

Walaupun akhirnya banyak kerusakan fisik terjadi di keseluruhan daerah Spanyol dan menyisakan negara fasis menyusul Perang Dunia II, namun hingga kematiannya, Franco masih dielukan oleh rakyatnya meskipun kepemimpinannya bersifat diktator dan sering menggunakan kekerasan dalam menjalankan pemerintahannya. Ideologi Franco pada masa kepemimpinannya dikenal nama *Falangisme*¹⁰. Francisco Franco meninggal dengan tenang dan ditangani oleh massa pengikutnya meskipun kepemimpinannya selama lebih dari 30 tahun pasca perang

⁹ Michael Mann, *Op. Cit*, hlm 347

¹⁰ Istilah *Falangisme* tersebut berasal dari kata "Falange" atau *Falange Espanola Tradicionalista Y De Las Juntas De Ofensiva Nacional-Sindicalista* sebuah partai yang berdiri pada tahun 1933. Partai ini didirikan oleh seorang bernama Jose Antonio Primo de Rivera, . perdana menteri selama pemerintahan Raja Alfonso XIII di Spanyol dari 1923 -1930. Paul Preston, *Op.Cit*, hlm 35

saudara Spanyol bersifat diktator dan melakukan kekerasan militer didalam masa kepemimpinannya. Adapun masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah :

1. Menganalisa mengenai kebijakan pemerintahan Francisco Franco di Spanyol dari tahun 1939 – 1975.
- 2 Menganalisa cara-cara yang ditempuh Francisco Franco dalam mempertahankan dan menjalankan pemerintahannya pasca perang saudara di Spanyol tahun 1936 - 1939.

1.3 Signifikansi Penelitian

Penulisan skripsi ini, secara praktis diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai konsep kepemimpinan, khususnya yang terjadi di Negara Spanyol dibawah kepemimpinan Francisco Franco. Lalu, secara akademis, semoga skripsi ini bisa menjadi referensi untuk mendalami kepemimpinan politik salah satu tokoh, terutama penggunaan konsep kepemimpinan termasuk kajian dan pembahasannya. Terkait dengan hal tersebut, skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan teoritis bagi para mahasiswa ilmu politik dalam memahami pemikiran politik yang ada serta menambah pengetahuan dalam penggunaan pendekatan yang lebih variatif sesuai perkembangan ilmu politik.

1.4 Kerangka Pemikiran

Untuk mencoba memahami dan menjawab permasalahan yang telah dijabarkan dalam perumusan makalah, maka diperlukan teori sebagai acuan dan bahan perbandingan. Untuk menjelaskan bertahannya pemerintahan Francisco Franco di Negara Spanyol pasca runtuhnya fasisme di Eropa dan juga bisa terhindar dari serangan sekutu pada masa perang dunia II , maka akan dijelaskan dengan tiga

konsep pemikiran yang terkait. Adapun konsep pemikiran tersebut adalah konsep kebijakan, militerisme dan fasisme.

1.4.1 Konsep Kebijakan

Analisis kebijakan bersifat multidisipliner, karena banyak meminjam teori, metode dan teknik dari studi ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu psikologi. Fokus utama studi ini adalah pada penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.¹¹ Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt mendefinisikan kebijakan sebagai:¹²

“Kebijakan adalah “keputusan tetap” yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.”

Kebijakan secara definitif merupakan serangkaian tindakan pemerintah baik dilakukan maupun tidak dilakukan, dipilih oleh seorang atau sejumlah aktor, dilaksanakan dan memiliki pengaruh terhadap sebagian besar orang untuk mencapai tujuan atau memecahkan persoalan tertentu.¹³ Definisi lain menurut Thomas Dye yang dikutip oleh AG. Subarsono, bahwa definisi kebijakan mengandung makna:¹⁴

1. Kebijakan tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta
2. Kebijakan menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Dalam studi kebijakan terdapat dua pendekatan, yakni: pertama dikenal dengan istilah analisis kebijakan (*policy analysis*), dan kedua kebijakan publik politik (*political public policy*). Pada pendekatan pertama, studi analisis kebijakan lebih terfokus pada studi pembuatan keputusan (*decision making*) dan penetapan kebijakan

¹¹ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.1.

¹² Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), hlm. 47.

¹³ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Jakarta: Media Presindo, 2002), hal.110.

¹⁴ AG. Subarsono, *Op. Cit.*, hlm. 1.

(*policy formation*) dengan menggunakan model-model statistik dan matematika yang canggih. Sedangkan pada pendekatan kedua, lebih menekankan pada hasil dan *outcome* dari kebijakan publik daripada penggunaan metode statistik, dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu, dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan.¹⁵

Kerangka kerja kebijakan akan ditentukan oleh beberapa variabel sebagai berikut:¹⁶

1. Tujuan yang akan dicapai
2. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.
3. Sumberdaya yang mendukung kebijakan.
4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.
5. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.
6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan sebagainya. Dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, dan lain-lain.¹⁷

Analisis kebijaksanaan (*policy analysis*) dengan menggunakan kata “analisis” sebagai sebutan mudah bagi segala macam informasi, pembicaraan, dan analisis tentang kebijaksanaan, istilah “analisis kebijaksanaan” biasanya menunjuk batasan yang lebih sempit sekitar bentuk-bentuk spesifik dari analisis profesional. Dalam bentuknya yang terbaik, suatu “analisis kebijaksanaan” merumuskan masalah kebijaksanaan sebagai sesuatu yang utuh, memerinci sasaran dan nilai-nilai lainnya,

¹⁵ AG. Subarsono, *Op. Cit.*, hlm. 5.

¹⁶ *Ibid*, hlm 5

¹⁷ AG. Subarsono, *Op. Cit.*, hlm. 3.

mengajukan dan mengevaluasi alternatif pemecahan, dan mengidentifikasi pemecahan yang paling erat berkaitan dengan nilai-nilai yang telah diformulasikan.¹⁸

Selain itu, proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Dari awal kepemimpinannya, Franco telah merancang untuk terus bisa mempertahankan kekuasaannya, termasuk dalam penentuan orang yang akan menggantikannya jika dia sudah tidak memimpin di Spanyol. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Franco bisa dibilang selalu bisa mengatasi permasalahan – permasalahan terhadap rezimnya dan juga membuat kebijakan yang tepat. Kebijakan dari pemerintahan franco digunakan secara diktator dan totaliter dengan terus menekan masyarakat sehingga menjadi tidak mempunyai daya untuk melawan pemerintahannya.

Selain kebijakan politiknya yang diktator, Franco juga menggunakan bantuan kekuatan militer untuk mempertahankan kekuasaannya. Francisco Franco menggunakan kekuatan militer dengan melakukan pemberontakan yang mengakibatkan perang saudara di Spanyol. Konsep dari militerisme sendiri merupakan gabungan antara kata *militer* dan *isme*. Secara Terminologi dapat kita maknai bahwa *Militerisme* adalah sebuah paham yang bertujuan untuk menerapkan tatanan kehidupan baik ideologi, politik ekonomi, sosial dan budaya hingga bersifat militeristik. Setiap negara memiliki kondisi yang berbeda karena latar belakang sejarah, peran tradisional militer, dokumentasi institusi militer dan orang – orang yang berada di balik seragam mereka. Dalam beberapa kasus, dominasi politik atas militer tidak dapat diperoleh dalam sesaat karena beberapa alasan (keamanan, kapasitas institusional, profesionalisme).¹⁹

¹⁸ Charles E. Lindblom, *Proses Penetapan Kebijaksanaan*, (Jakarta: Erlangga, 1986), hlm. 15.

¹⁹ Prof.Dr. Thomas Meyer. *Military and Democracy*, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2004, hlm 12

Secara berangsur tatanan kehidupan ini menjadi sebuah ideologi Militerisme, secara historis paham tersebut sangat erat kaitannya dengan ideologi Fasisme atau Nazisme. Dalam pandangan kedua paham itu merupakan pengorganisasian pemerintah dan massa secara totaliter oleh kediktatoran suatu partai, yang berwatak atau bercorak nasionalistik, rasialistik, militeristik, dan imperialistik²⁰. Salah satu sifat dari Militerisme adalah menjaga keutuhan sebuah struktur negara dengan menghindari segala bentuk konflik, artinya harus ada kekuatan struktural yang selalu menjadi penjaganya, tetapi kemudian dengan teori ini, kecenderungan yang ada adalah *atomisasi*, sehingga jelaslah secara subjektif bahwa Militerisme merupakan paham yang anti demokrasi, karena secara sederhana bahwa dalam demokrasi tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah konflik, walaupun kemudian diselesaikan juga secara musyawarah. Konsep militerisme Francisco Franco inilah yang menjadi perbedaan dasar antara Franco dengan Hitler dan Mussolini. Kalau Mussolini dan Hitler menjadi pemimpin di negaranya sebagai pemimpin partai politik yang revolusioner dan mengabdikan kepada ideologi fasis, sedangkan Franco mendapatkan kekuasaannya dengan dukungan utamanya yaitu angkatan bersenjata Spanyol dan bukan dari partai Falange yang bersifat fasis. Menurut cara berpikir fasis, manusia hanya bisa maju dengan melibatkan diri di dalam peperangan. Oleh karena itu militerisme adalah karakteristik dari ideologi fasisme yang paling menentukan. Untuk mendorong semangat perang ini, partai-partai fasis berusaha untuk mengesankan rakyat dengan pakaian-pakaian seragam dan upacara-upacara yang megah. Mussolini membuat pernyataan yang meyakinkan bahwa dibutuhkan kekuatan militer untuk memperoleh kekuasaan. Mussolini mengatakan :

“Fasisme tidak percaya pada kemungkinan ataupun kegunaan perdamaian abadi. Hanya perang yang membangkitkan seluruh energi manusia hingga ke tingkat tertinggi dan memberi martabat bagi orang yang punya keberanian untuk mencapainya²¹. “

²⁰ William Ebenstein, William Ebenstein & Edwin Forgelmen, alih bahasa Drs Alex Jamadu, *Isme-isme dewasa ini*, Jakarta : Erlangga 1987, hlm 97

²¹ Ebenstein, *Op, Cit.*, hlm 78

1.4.2 Konsep Fasisme

Istilah fasisme berasal dari bahasa Italia, *fascio*. Kata tersebut merupakan pengembangan dan turunan dari bahasa latin yaitu *fasces*. *Fasces* mempunyai arti kumpulan tangki kayu yang diikat pada sebuah kapak dan ini merupakan simbol kekuatan dan kekuasaan pada zaman Romawi Kuno²². Terminologi Fasisme merupakan konsep gagasan – gagasan ideal yang diambil dari nama sebuah gerakan politik atau partai politik tertentu dan namanya diambil dari nama penggagas partai tersebut.²³ Bila membicarakan tentang fasisme kebanyakan orang selalu berpikir bahwa itu merupakan salah satu bagian masa lalu yang tak terpisahkan dari rangkaian peristiwa yang terjadi di belahan benua Eropa setelah perang dunia I. Bahkan tidak sedikit pula anggapan yang selalu mengaitkan istilah fasisme dengan rasisme. Padahal tidak ada hubungan yang pasti antara fasisme dan rasis.²⁴

Menurut William Ebenstein dalam bukunya *Today's ism, Communism, Fascism, Socialism* berpendapat bahwa :

Fasisme salah satu bentuk organisasi pemerintahan dan masyarakat secara totaliter serta dipimpin oleh seorang diktator terpilih yang berasal dari satu partai tunggal. Karakter partai tersebut secara umum sangat nasionalis, rasialis, militeristis, dan kebijakan politik luar negeri yang agresif (imprealis).²⁵

Menurut Ebenstein, fasisme yang terjadi di Eropa merupakan pengorganisasian pemerintahan dan masyarakat secara totaliter oleh kediktatoran partai tunggal yang sangat nasionalis, rasialis, militeristis, dan imperialis²⁶. Dasar kebijakan sosial fasisme adalah pemaksaan gagasan, dan keharusan rakyat

²² Rene Albrecht-Carrie, *Fasisme, Sebuah Perkenalan Selintas* dalam Cheppy Hai Cahyono (ed), Ideologi Politik, Yogyakarta : Hanindata, 1986, hlm 95

²³ Jaroslav Krejci, *Introduction: Concept of Right and Left*, dalam Luciano Cheles *et.al.* penyunting, *Neo Fascism in Europe*, New York : Longman Group, 1990, hlm 1

²⁴ Walter Laquer, *Fascism : Past, Present, Future*, Oxford University Press, 1996, hlm 3

²⁵ Ebenstein, *Op. Cit*, hlm 121

²⁶ *Ibid*, hlm 115

menerimanya. Fasisme bertujuan membuat individu dan masyarakat berpikir dan bertindak seragam. Untuk mencapai tujuan ini, fasisme menggunakan kekuatan dan kekerasan bersama semua metode propaganda. Fasisme menyatakan siapa pun yang tidak mengikuti gagasan-gagasannya sebagai musuh, bahkan sampai melakukan pembantaian manusia²⁷. Sebenarnya tidak sulit untuk menemukan unsur – unsur pokok dalam pandangan fasis, unsur tersebut antara lain :

1. Ketidakpercayaan pada kemampuan nalar
2. Pengingkaran persamaan derajat kemanusiaan
3. Kode perilaku yang didasarkan pada kebohongan dan kekerasan
4. Pemerintahan oleh kelompok elit
5. Totaliterisme
6. Rasialisme dan Imperialisme
7. Menentang hukum dan ketertiban internasional²⁸

Rasisme juga merupakan ideologi fundamental pada rezim-rezim fasis lainnya, seperti rezim Mussolini dan Franco, walau tidak sejauh pada Nazi. Mussolini menyebutkan bahwa kaum Romawi yang memerintah Kekaisaran Roma adalah sebuah “ras unggul”, dan bahwa orang-orang Italia, sebagai keturunan mereka, juga memiliki sifat unggul ini. Penaklukan Ethiopia didasarkan pada ide ras unggul ini, dan bahwa orang-orang Ethiopia yang berkulit hitam ini harus tunduk kepada orang Italia, sesuai dengan apa yang dianggap sebagai hirarki rasial alamiah. Franco mengemukakan klaim serupa untuk Spanyol. Ideologi fasisme di Spanyol bertindak lebih moderat, karena pada awalnya fasisme yang berkembang merupakan bentuk perkembangan kepentingan kelompok nasionalis. Jenderal Franco sendiri juga bukanlah seorang fasis, melainkan hanya anggota militer biasa, tetapi Franco kemudian memanfaatkan kelompok Falangis yang berideologi fasis dalam

²⁷ Mark Bruzonsky, *Jabotinsky The Legend and Its Power*, *Israel Horizons*, vol. 29, no. 2, March/April 1981, hlm. 19

²⁸ Ebenstein, *Op, Cit*, hlm 123

mendapatkan dan menjalankan kekuasaannya di Spanyol. Berbeda dengan Fasisme Jerman dan Italia, dimana partailah yang memanfaatkan militer.²⁹

Berdasarkan kejadian di negara – negara Eropa, fasisme biasanya lahir dalam masyarakat yang telah maju (*developed countries*) khususnya dalam hal teknologi dan sudah pernah mengalami demokrasi (*post democracy*). Gagalnya pelaksanaan sistem demokrasi karena kebebasan yang lahir telah memicu tingginya tingkat kesenjangan. Oleh karena itu, bukanlah suatu hal yang aneh bila tawaran ideologi fasisme menentang keras sistem tersebut (demokrasi) mendapat sambutan hangat. Sebagaimana telah dipahami, fasisme merupakan suatu ideologi yang secara fanatik yang menentang agama, tetapi kadang kala dapat saja menyembunyikan kebenciannya karena alasan politis, dan bahkan menampilkan dirinya seolah benar-benar taat beragama³⁰. Tujuan di balik keinginan kaum fasis agar tampak takut kepada Tuhan adalah untuk menyelewengkan konsep-konsep agama dari arti yang sebenarnya, dan mempergunakannya sebagai alat bagi sasaran-sasaran politik mereka.

Pengertian dari fasisme terhadap agama berbeda-beda sesuai dengan kondisi dimana masyarakat tersebut berada. Paham fasisme mencuat ketika dimulainya masa Perang Dunia II. Setidaknya perang yang muncul saat itu, terjadi sebagai akibat perkembangan ideologi fasis di Italia dan Jerman yang ingin meluaskan pengaruh ekstra-nasionalisnya. Sehabis berlangsungnya Perang Dunia II, ideologi fasisme seakan-akan berakhir, tetapi hal yang terjadi tidak nyata demikian. Sebagai sebuah pemikiran, bibit fasisme akan terus ada selama terdapat kondisi obyektif yang membentuknya. Fasisme muncul dengan pengorganisasian pemerintahan dan masyarakat secara totaliter, kediktatoran partai tunggal yang bersifat: ultra-nasionalis, rasis, militeris dan imperialis. Fasisme juga muncul pada masyarakat pasca-demokrasi dan pasca-industri. Jadi, fasisme hanya muncul di negara yang memiliki pengalaman demokrasi. Eric Fromm dalam karyanya, *Escape*

²⁹ Walter Laquer, *Op, Cit*, hlm 6

³⁰ Ebenstein, *Op, Cit*, hlm 114

From Freedom, menguraikan teori menarik mengenai konteks psikologis fasisme. Ia berteori bahwa fasisme ada kaitan erat antara variabel – variabel ekonomi dengan variabel – variabel psikologis³¹.

Hal- hal yang penting dalam pembentukan suatu karakter negara fasis adalah militer, birokrasi, prestise individu sang diktator dan terpenting, dukungan massa. Semakin keras pola kepemimpinan suatu negara fasis, semakin besar pula dukungan yang didapatnya. Sementara itu, bila dilihat dari faktor psikologis, fasisme biasanya muncul karena adanya sebagian besar orang dalam suatu negara merasa termarginalkan, tidak aman, marah, dan frustrasi³². Selain itu, terdapat pula alasan lain lahirnya fasisme yang terdengar emosional, yaitu kerinduan masyarakat akan kebesaran negaranya di masa lalu. Kemudian oleh pihak atau kelompok yang berkepentingan situasi ini dimanfaatkan dengan cara memprovokasi dan mengalihkan sikap mereka menjadi rasa benci yang berlebihan. Filsuf Prancis George Sorel (1847-1922), salah seorang pemikir fasisme yang meninggalkan pengaruh khusus pada Mussolini, berada pada posisi terdepan dalam daftar orang-orang yang meyakini pendapat ini. Sorel meyakini bahwa masyarakat secara alamiah akan mengalami kemerosotan dan kekacauan. Menurutnya, kehancuran harus dicegah dengan menggunakan kekuatan, melalui pembentukan tatanan yang totaliter.³³ Fasisme yang terjadi di Spanyol merupakan pengorganisasian pemerintah dan masyarakat secara totaliter oleh kediktatoran partai tunggal yang sangat nasionalis, militeristis dan imperialis.³⁴

³¹ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat :Kajian Sejarah perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm 336

³² Ebenstein , *Op, Cit*, hlm 126

³³ Ebenstein , *Op, Cit*, hlm 122

³⁴ *Ibid*, hlm 114

1.5 Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu penekanan pada pentingnya studi kasus, konteks, dan interpretasi peneliti dalam menganalisis data.³⁵ Penelitian ini juga bersifat deskriptif, yang dimaksudkan dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang lebih kepada penuturan, menganalisis, dan mengklasifikasi.³⁶

Untuk menjelaskan kasus yang diangkat, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Didukung oleh data-data yang berasal dari buku-buku, situs-situs internet, surat kabar, dan majalah, serta data dari jurnal-jurnal ilmiah.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan.

Sistematika penulisan BAB I akan membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Latar Belakang Sosial Politik Spanyol sebelum tahun 1939

Dalam BAB II, akan dibahas mengenai latar belakang serta kondisi Spanyol sebelum terjadinya perang saudara dimana sebelumnya spanyol mempunyai negara – negara koloni terlibat perang hebat dengan amerika, selain itu di bab ini juga akan dijelaskan latar belakang perang saudara Spanyol, dan juga keterlibatan Franco di dalam perang saudara tersebut.

³⁵ Lawrence W. Neuman, *Social Research Methods*, (Boston: Allyn and Bacon, 2003), hlm. 146-149

³⁶ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1970), hlm.131.

BAB III Kebijakan Pemerintahan Francisco Franco di Spanyol (1939 – 1973)

BAB III berupa pembahasan kebijakan pemerintahan Francisco Franco yang membuat pemerintahan Spanyol tetap bertahan di bawah kepemimpinan Francisco Franco selama lebih dari 30 tahun pasca perang saudara di Spanyol.

BAB IV Kesimpulan

Pembahasan dalam BAB IV merupakan bab terakhir yang akan menyimpulkan dan memberikan penjelasan secara garis besar dari setiap bab sebelumnya berdasarkan data tentang analisis kebijakan pemerintahan Francisco Franco di Spanyol 1939 – 1973.

